

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG

Klementinus Heriyadi Bin

NPP. 29.1313

Asdaf Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: klementinusheryadi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The realization of the Kupang City Goods and Services Expenditure Budget for the last four years has never reached one hundred percent due to several factors, including low budget absorption in the first semester and the procurement of goods and or services that failed or were not achieved. **Purpose:** This research was conducted to determine the implementation of the procurement of goods and services, evaluate the implementation of the budget for goods and services that have reached an efficient and effective economy, the inhibiting factors for the implementation of the goods and services budget as well as the efforts made to overcome existing obstacles so that the implementation of the budget can be maximized. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Determination of the informants used is a purposive sampling technique. Then, data analysis was carried out through data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. **Result:** The results obtained that the implementation of the budget for goods and services in Kupang City is quite good but has not been implemented optimally. **Conclusion:** Economically, the implementation of the budget for goods and services in Kupang City reaches a percentage of eighty-seven percent, efficiency reaches eighty-seven percent and effectiveness reaches eighty percent. In addition, there are inhibiting factors, namely the Covid-19 pandemic that has little effect on the implementation of the goods and services budget; Fear of the apparatus when involved in legal problems in procurement; Inadequate quality of human resources involved in the procurement of goods and services; The number of qualified employees, staff and or employees is very small in the field of procurement of goods and services. The efforts made are in the form of developing procurement applications through e-Pr; Conduct socialization and training regarding correct procedures and the scope of main tasks and functions in the procurement of goods and services; Improving the quality of human resources by means of training, courses, training and technical guidance regarding the procurement of goods and services; Bring in several qualified experts in the field of procurement of goods and services. The author suggests that the Kupang City government implement the e-Pr application in the implementation of the goods and services budget as well as hold socialization, technical guidance, training, courses and non-formal training related to the procurement of goods and services so that the implementation of the goods and services budget can be carried out optimally.

Keywords: Budget Execution Evaluation, Goods and Services Expenditure, Economical Efficient and Effective.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang: Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kota Kupang selama empat tahun terakhir belum pernah mencapai seratus persen yang disebabkan beberapa faktor yaitu diantaranya penyerapan anggaran yang rendah di semester pertama dan adanya pengadaan barang dan atau jasa yang gagal atau tidak tercapai. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa telah mencapai ekonomis efisien dan efektif, faktor penghambat evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga evaluasi pelaksanaan anggaran bisa menjadi maksimal. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penentuan infroman yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Kemudian, analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh bahwa setelah dievaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa di Kota Kupang sudah cukup bagus namun belum dilaksanakan secara maksimal. **Kesimpulan:** Secara ekonomis evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa di Kota Kupang mencapai persentase delapan puluh tujuh persen, efisiensi mencapai delapan puluh tujuh persen dan efektifitas mencapai persentase delapan puluh persen. Selain itu terdapat faktor penghambat yaitu Pandemi *covid-19* sedikit berpengaruh dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa; Ketakutan aparatur ketika terlibat dalam permasalahan hukum dalam pengadaan; Kualitas SDM kurang memadai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa; Kuantitas pegawai, staf dan atau karyawan yang mumpuni sangat sedikit dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun upaya yang dilakukan berupa pengembangan aplikasi pengadaan melalui e-Pr; Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur yang benar serta ruang lingkup tupoksi dalam pengadaan barang dan jasa; Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan, kursus, diklat dan bimtek mengenai pengadaan barang dan jasa; Mendatangkan beberapa tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Penulis menyarankan agar pemerintah Kota Kupang menerapkan aplikasi e-Pr dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa serta mengadakan sosialisasi, bimtek, diklat, kursus dan pelatihan non-formal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa agar evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa dapat dilakukan secara maksimal.

Kata kunci: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Belanja Barang dan Jasa, Ekonomis Efisien dan Efektif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Kota Kupang pada lima tahun terakhir adanya gejolak naik turun, yang artinya kadang realisasi lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan pada APBD. Hal ini terjadi karena adanya gejolak dalam kebutuhan belanja barang dan jasa. Berikut adalah tabel dari Belanja Barang dan Jasa dari tahun 2018-2021:

Tabel 1.1
Belanja Barang Dan Jasa dari APBD Kota Kupang 2018-2021

| Tahun | Anggaran (dalam Rp) | Realisasi | Persentase |
|-------|---------------------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|------|--------------------|--------------------|----------|
| 2017 | 213.812.360.535,00 | 232.497.259.670,00 | 108,74 % |
| 2018 | 278.439.531.199,00 | 274.599.733.771,00 | 98,62 % |
| 2019 | 315.015.038.555,00 | 283.828.405.178,00 | 90,10 % |
| 2020 | 287.041.809.398,00 | 262.040.879.656,00 | 91,29 % |
| 2021 | 340.682.433.477,00 | 296.381.284.330,00 | 87 % |

Sumber: BKAD Kota Kupang dan diolah oleh peneliti 2021

Data yang dapat dilihat pada tabel 1.2, Permasalahan inti disini mengapa pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa selalu mengalami gejala realisasi yang lebih dan/atau kurang dari seratus persen, apakah ada yang salah dalam penganggarannya atautkah salah dalam pelaksanaan anggarannya. Tabel diatas merupakan acuan dan perbandingan data pengantar untuk peneliti memfokuskan membahas belanja barang dan jasa di tahun 2021. Walaupun dengan belanja barang dan jasa yang anggaran dan realisasinya tergolong besar yang sekiranya mampu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di Pemda Kota Kupang, peneliti masih menemukan beberapa pokok yang menjadi inti permasalahan berkaitan dengan hal tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BKAD Kota Kupang dan LPSE Kota Kupang Terjadinya pola penyerapan belanja barang dan jasa yang rendah pada semester pertama dan menumpuk di akhir tahun berjalan dan realisasi anggaran yang belum mencapai seratus persen, hal ini disebabkan karena masih terdapat tender dan paket yang gagal untuk diadakan. Pola demikian mengganggu rencana kinerja kebijakan belanja barang dan jasa terhadap perekonomian secara umum, contohnya seperti belanja keperluan kantor yang penggunaannya kadang tersedat-sendat sehingga menimbulkan kekurangan alat dan media dalam pekerjaan kantor yang mengakibatkan lambatnya pelayanan yang kantor/instansi tersebut kepada masyarakat.

Masa sekarang sedang merebaknya virus covid-19 yang mengakibatkan pengaruh besar pada perekonomian dan berdampak pada penggunaan belanja barang dan jasa itu sendiri. Selain itu yang menjadi inti permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mencari tahu penyebab atas hasil evaluasi yang bisa dilihat pada tabel sebelumnya bahwa penyerapan anggaran belanja barang dan jasa yang rendah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas peneliti menetapkan pembatasan masalah pada penelitian ini lebih difokuskan pada evaluasi pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Jasa. Adapun lokus pada penelitian ini adalah kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang belanja barang dan jasa dari berbagai jenis tahapan. Penelitian Nurlia yang berjudul Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. PLN (PERSERO) Area Makassar Utara (Nurlia, 2017) yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menguraikan secara terperinci mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara. Pada dasarnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (PERSERO) area Makassar Utara sudah berlangsung sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada, dan dalam pelaksanaannya sudah baik. Tetapi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu pekerjaan jasa kelistrikan ada aturan baru dari IJK pemerintah Direktorat Jenderal Energi Sumber Daya Mineral itu mengharuskan vendor atau

perusahaan yang ikut dalam pekerjaan jasa penunjang kelistrikan harus memiliki: a. SBU pembangunan/ pemeliharaan/ pengujian; b. IUJPTL (Izin Usaha Jasa Pendirian Ketenagalistrikan). Penelitian Amelia Anisah Putri yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Tegal (Amelia Anisah Putri, 2019) yang menggunakan metode Deskriptif yaitu dengan menjelaskan mengenai Dinamika Sistem bahwa tendensi-tendensi dinamik yang presisten (terjadi terus-menerus) pada setiap sistem yang kompleks bersumber dari sturktural kasual yang membentuk sistem itu. Penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tegal oleh Unit Layanan Pengadaan Elektronik (LPSE) sudah efektif, diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edward III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tentunya terkait dengan e-procurement di Kabupaten Tegal. Penelitian Ahmad yang berjudul Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar (Ahmad, 2020) yang menggunakan metode Kualitatif dengan Human Instrument. Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar, secara garis besar menunjukkan implementasi e-procurement di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar masih berjalan dengan baik pada variabel sumber daya manusianya sebagai pelaksana kegiatan dibuktikan dengan adanya sertifikat, selanjutnya pada variabel komunikasi memberikan aksesibilitas lebih pada user dan variabel tujuan memberikan pelayanan yang tidak seimbang antara tender dan non-tender terkait transparansi kemudian lingkungan Kota Makassar memberikan kontribusi dibidang ekonomi yaitu swakelola dan politik untuk Pra-tender, serta kepatuhan implementor yang masih mematuhi peraturan terkait tender.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-induktif. Penulis menggunakan konsep teori evaluasi yang dikemukakan oleh Marvel Alkin di tahun 1969 (Divayana 2017:116) yang terdiri dari *Need Assessement, Planing Program, Formative Evaluation dan Summative Evaluation*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada masa pandemi *covid-19* tahun 2021 di Kota Kupang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Sekretaris BKAD Kota Kupang, Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Kupang, Kepala Bidang Akutansi dan Aset BKAD Kota Kupang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017-2021, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021, Rencana Umum Pengadaan Kota Kupang tahun anggaran 2021, diskusi terhadap beberapa pegawai BKAD dan masyarakat, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi *covid-19* Kota Kupang tahun anggaran 2021. Adapun analisisnya

menggunakan teknik model interaktif yang disampaikan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2011 : 246). Model yang digunakan terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi/kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 Kota Kupang tahun anggaran dengan menggunakan teori evaluasi menurut Marvel Alkin yang terdiri dari dimensi *Need Assesment, Planning Program, Formative Evaluation, Summative Evaluation* yang dijabarkan dalam beberapa indikator yang akan dijelaskan dalam subbab berikut.

3.1. Target dan Tujuan

Target dan tujuan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa kota Kupang sebagai berikut: Membandingkan dan menghitung besaran realisasi dilapangan dengan dana yang dianggarkan apakah sudah berjalan sesuai yang dianggarkan atau belum; Menertibkan administrasi antara BKAD dan LPSE, yaitu menyamakan data dan transaksi antara pengadaan elektronik dan manual agar adanya kesesuaian data; Mengecek apakah tiap-tiap program pengadaan telah berhasil dilakukan atau tidak. Mengetahui apakah pelaksanaan belanja barang dan jasa yang telah dilakukan sudah kredibel dan berakuntabel.

3.2. Kebutuhan Barang dan Jasa

Kebutuhan barang dan jasa Kota Kupang termuat di dalam RUP/ Rencana Umum Pengadaan. Rencana Umum Pengadaan Kota Kupang Tahun anggaran 2021 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 RUP Kota Kupang Tahun 2021

| No | Satuan Kerja | Penyedia | | Swakelola | | Penyedia Dalam Swakelola | | Total | |
|----|---|----------|--------|-----------|---------|--------------------------|-------|-------------|------------|
| | | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Total Paket | Total Pagu |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PA/KPA | 121 | 1.325 | 108 | 19.200 | 15 | 597 | 244 | 21.123 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PA/KPA | 39 | 242 | 44 | 12.251 | 2 | 14 | 85 | 12.508 |
| 3 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PA/KPA | 43 | 2.098 | 49 | 15.186 | 0 | 0 | 92 | 17.285 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PA/KPA | 47 | 680 | 31 | 4.293 | 5 | 27 | 83 | 5.001 |
| 5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH PA/KPA | 19 | 2.089 | 9 | 15.803 | 0 | 0 | 28 | 17.893 |
| 6 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PA/KPA | 52 | 320 | 41 | 2.825 | 0 | 0 | 93 | 3.146 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PA/KPA | 138 | 2.013 | 56 | 5.157 | 0 | 0 | 194 | 7.171 |
| 8 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PA/KPA | 32 | 302 | 36 | 4.226 | 0 | 0 | 68 | 4.529 |
| 9 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PA/KPA | 8 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.088 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL PA/KPA | 55 | 2.571 | 51 | 5.309 | 3 | 14 | 109 | 7.895 |
| 11 | DINAS KESEHATAN PA/KPA | 59 | 15.893 | 69 | 89.330 | 0 | 0 | 128 | 105.224 |
| 12 | DINAS KETAHANAN PANGAN PA/KPA | 145 | 1.081 | 79 | 3.739 | 0 | 0 | 224 | 4.820 |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PA/KPA | 51 | 3.757 | 55 | 4.255 | 7 | 126 | 113 | 8.139 |
| 14 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PA/KPA | 78 | 1.389 | 43 | 3.877 | 0 | 0 | 121 | 5.266 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN PA/KPA | 172 | 18.388 | 63 | 22.256 | 4 | 105 | 239 | 40.749 |
| 16 | DINAS PARIWISATA PA/KPA | 73 | 479 | 49 | 3.964 | 4 | 53 | 126 | 4.497 |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PA/KPA | 92 | 38.741 | 5 | 2.001 | 0 | 0 | 97 | 40.743 |
| 18 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN PA/KPA | 45 | 1.352 | 26 | 6.711 | 0 | 0 | 71 | 8.064 |
| 19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PA/KPA | 133 | 890 | 84 | 3.419 | 15 | 68 | 232 | 4.378 |
| 20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PA/KPA | 5 | 205 | 134 | 6.193 | 0 | 0 | 139 | 6.399 |
| 21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG PA/KPA | 161 | 54.944 | 96 | 271.154 | 8 | 148 | 265 | 326.247 |
| 22 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PA/KPA | 81 | 2.075 | 70 | 5.431 | 0 | 0 | 151 | 7.507 |
| 23 | DINAS PERHUBUNGAN PA/KPA | 51 | 2.202 | 50 | 9.878 | 0 | 0 | 101 | 12.081 |
| 24 | DINAS PERIKAMAN PA/KPA | 67 | 1.979 | 32 | 2.419 | 1 | 43 | 100 | 4.441 |
| 25 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PA/KPA | 120 | 6.180 | 36 | 692 | 26 | 265 | 182 | 7.138 |
| 26 | DINAS PERTANIAN PA/KPA | 156 | 1.086 | 31 | 8.753 | 0 | 0 | 187 | 9.839 |
| 27 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PA/KPA | 75 | 19.770 | 39 | 4.229 | 0 | 0 | 114 | 24.000 |
| 28 | DINAS SOSIAL PA/KPA | 10 | 81 | 13 | 23.904 | 22 | 170 | 45 | 24.156 |
| 29 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PA/KPA | 67 | 570 | 42 | 3.183 | 0 | 0 | 109 | 3.753 |
| 30 | INSPEKTORAT DAERAH PA/KPA | 21 | 470 | 23 | 4.550 | 0 | 0 | 44 | 5.020 |
| 31 | KECAMATAN ALAK PA/KPA | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 32 | KECAMATAN KELAPA LIMA PA/KPA | 21 | 460 | 14 | 8.218 | 0 | 0 | 35 | 8.678 |
| 33 | KECAMATAN KOTA LAMA PA/KPA | 20 | 659 | 16 | 10.362 | 0 | 0 | 36 | 11.021 |
| 34 | KECAMATAN KOTA RAJA PA/KPA | 22 | 483 | 27 | 9.331 | 0 | 0 | 49 | 9.815 |
| 35 | KECAMATAN MAULANA PA/KPA | 10 | 106 | 12 | 11.184 | 0 | 0 | 22 | 11.291 |
| 36 | KECAMATAN OBOBO PA/KPA | 56 | 828 | 23 | 8.830 | 3 | 50 | 82 | 9.708 |
| 37 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S K LERIK KOTA KUPANG PA/KPA | 25 | 46.902 | 3 | 10.797 | 0 | 0 | 28 | 57.700 |
| 38 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PA/KPA | 26 | 861 | 27 | 12.455 | 4 | 90 | 57 | 13.408 |
| 39 | SEKRETARIAT DAERAH PA/KPA | 209 | 12.768 | 139 | 48.881 | 42 | 1.023 | 390 | 62.672 |
| 40 | SEKRETARIAT DPRD PA/KPA | 7 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.088 |

Sumber: BKAD Kota Kupang data diolah 2022.

Rencana Umum Pengadaan merupakan identifikasi dari kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Pengguna anggaran suatu Instansi dan selanjutnya dibahas dalam sidang anggaran bersama dengan DPRD. Pandemi *covid-19* tidak mempengaruhi penganggaran belanja barang dan jasa. Tujuan utama pemerintah Kota Kupang dalam evaluasi pelaksanaan belanja barang dan jasa adalah agar kerja pemerintah dalam konteks pemerintah kewilayahan dan instansi dinas dan badan yang terlibat langsung dengan masyarakat tidak terhambat dan tersendat-sendat dalam hubungan dengan masa pandemi dimana masyarakat sangat memerlukan pelayanan pemerintah secara material dan logistik. Pemerintah memiliki sasaran dan target untuk merealisasikan belanja barang dan jasa seratus persen dalam pelaksanaannya namun banyak kendala-kendala saat dilapangan dalam masa pandemi sehingga kurang maksimal.

3.3. Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas yang Dipersiapkan

Sarana dan prasarana dan fasilitas evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai pengadaan barang dan jasa untuk kemudian menjadi pendukung dalam melakukan evaluasi. Sarana dan prasarana fasilitas tersebut yakni: E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ruang Lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/ jasa sampai dengan pengumuman pemenang; E-procurement dan e-purchasing merupakan proses pemilihan barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua pejabat pengadaan dapat memilih barang /jasa pada pilihan terbaik dan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa; Dokumen pengadaan barang dan jasa, merupakan data yang didapatkan dari e-tendering dan e-purchasing yang sudah diolah menjadi sebuah data lengkap mengenai pengadaan barang dan jasa yang berfungsi sebagai bahan evaluasi; Evaluator dan/atau auditor sebagai sumber daya utama dalam melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terkait dokumen pelaksanaan pengadaan dan realisasi pelaksanaan pengadaan yang telah dilakukan.

3.5. Evaluasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa

Penulis menggunakan teori Evaluasi menurut Mardiasmo (2002) untuk mengukur rasio evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang. Evaluasi ini tujuannya adalah merangkai kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan evaluasi menurut Peraturan Pemerintah no. 39 Tahun 2006 yang memuat 3 elemen utama dalam *value for money*, yaitu untuk menghitung ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan menggunakan hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Tujuan yang dalam hal ini dikehendaki dalam konteks pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan konsep *value for money* yaitu ekonomis (hemat-cermat), efisiensi (tepat daya) dan efektivitas (tepat guna). Hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pengukuran Value for Money

| Uraian Kegiatan | Biaya (anggaran) | Input | Input (Realisasi Anggaran) | Output (Capaian Kegiatan) | Outcome (IKM) |
|-----------------|------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|------------------------------|-----------------------------|------|-----|
| Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kota Kupang 2021 | 340.682.433.477,00 (100%) | 296.381.284.330,00 (87%) | 100% | 80% |

Sumber: LRA Kota Kupang Per 31 Desember 2021, data diolah 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa anggaran yang disiapkan sudah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran, realisasinya hanya mampu mencapai delapan puluh tujuh persen dari anggaran yang disiapkan, dan tingkat keluaran/manfaat/outcome atas pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 Kota Kupang adalah baik yaitu mencapai angka delapan puluh persen dari keseluruhan realisasi anggarannya.

3.5 Permasalahan Yang Terjadi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa

Penulis menemukan beberapa permasalahan dalam proses evaluasi yang mempengaruhi proses evaluasi pelaksanaan belanja barang dan jasa itu sendiri, diantaranya yaitu: Dalam proses pengumpulan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa akun yang tidak mempunyai kode akun RUP. Setelah diteliti oleh penulis adanya 2 (dua) hal yang membuat suatu akun tidak mendapatkan Kode RUP, yaitu: (1) Kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak tertuang dan terdapat dalam RUP setiap instansi dan/atau terdapat perubahan APBD yang menyebabkan berubahnya RUP sehingga adanya kegiatan atau program tertentu ditiadakan dari RUP namun kegiatan atau program tersebut sudah dalam proses pelaksanaan. (2) Kesalahan dalam proses memasukan data dalam SIRUP LPSE oleh pihak Pengguna Anggaran dan pihak Kuasa Pengguna Anggaran sebagai user sehingga kegiatan dan program tersebut tidak mendapatkan kode akun RUP; Masih lemahnya pelaksanaan e-tendering serta e-pruchasing dan e-procurement sehingga menyebabkan kurangnya transparansi, yang mengakibatkan adanya persaingan tidak sehat dalam pengadaan dan belum tepat guna dan tepat daya; Banyaknya pelelangan pengadaan yang gagal akibat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

3.6 Hasil dan Dampak Dari Evaluasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa

Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 Kota Kupang yang telah di kerjakan dan di rangkum oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kota Kupang

| No | Indikator | Komponen Pendukung | Hasil Evaluasi |
|----|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Target dan tujuan | Perda Kota Kupang No. 2 Tahun 2021 | Target dan tujuan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa adalah untuk membandingkan realisasi dilapangan dengan apa yang telah dianggarkan sesuai anggaran dalam APBD dalam Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan, digunakan untuk mengecek hasil dari tiap-tiap pengadaan, apakah program masing-masing pagu berhasil atau tidakny serta |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | untuk mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan belanja barang dan jasa yang telah dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi terhadap keuangan. |
| 2 | Kebutuhan barang dan jasa | Rencana Umum Pengadaan Kota Kupang Tahun 2021 | Rencana Umum Pengadaan telah anggarkan berdasarkan analisis kebutuhan dan telah melewati siding anggaran yang menyatakan semua rencana anggaran yang terdapat didalam Rencana Umum Pengadaan merupakan anggaran yang wajar dan siap untuk dilaksanakan. |
| 3 | Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dipersiapkan | 1.E-Tendering 2.E-Purchasing dan E-Procurement | Pengadaan barang dan jasa kota kupang secara e-tendering telah dilaksanakan dibuktikan bahwa PA/KPA masing masing instansi telah menjadi user SIRUP LPSE. Namun pelaksanaan e-purchasing dan e-procurement belum maksimal dan masih dalam masa pengembangan yang menyebabkan kurangnya maksimal pengadaan barang dan jasa dikota kupang dibuktikan dengan penyerapan anggaran atau realisasi anggaran belanja barang dan jasa kota kupang tahun 2021 belum mencapai 100 persen. |
| 4 | Evaluasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa | 1.Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan <i>Value for Money</i> 2.Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kupang | Evaluasi Pelaksanaan belanja barang dan jasa berdasarkan <i>value for money</i> sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dibuktikan dengan nilai ekonomis 87 persen, nilai efisiensi 87 persen dan nilai efektifitas 80 persen. Pengadaan barang dan jasa juga sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dibuktikan dengan realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada LRA kota kupang tahun 2021 yang hanya 87 persen, hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengadaan yang gagal akibat tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dan sebagian besar dikarenakan nilai HPS yang menjadi tanggung jawab dari PPK. |
| 5 | Permasalahan Yang Terjadi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa | Observasi, wawancara dan dokumentasi | Berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat masalah dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa yaitu perubahan APBD yang menyebabkan perubahan RUP yang berakibat pada beberapa akun tidak mempunyai kode RUP; masih lemahnya pengadaan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | menggunakan <i>e-purchasing</i> dan <i>e-procurement</i> yang menyebabkan kurangnya transparansi, banyak lelang dan tender pengadaan yang gagal sebagian besar terjadi karena perubahan nilai HPS. |
|--|--|--|--|

Sumber: Data diolah peneliti 2022

Hasil pengamatan penulis terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Pemda Kota Kupang, dampak evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang adalah sebagai berikut: Dengan adanya evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa maka Pemerintah Kota Kupang bisa mengetahui tingkat penguasaan dan kompetensi para pejabat dan karyawan pelaku pengadaan barang dan jasa; Pemerintah Kota Kupang dapat mengetahui kesulitan atau rintangan dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa sehingga dengan diadakannya evaluasi dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, contohnya tender dan paket yang gagal; Masalah terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang yang menyebabkan tender dan paket gagal yaitu berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan itu dibutuhkannya kegiatan pelatihan, bimtek, kursus terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa sehingga bisa memaksimalkan pengadaan barang dan jasa; Sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan *e-procurement* dan *e-purchasing* secara maksimal agar adanya transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas serta efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang; Evaluasi yang diadakan menjadi umpan balik informasi yang baik untuk memperbaiki masalah-masalah dalam pengadaan barang dan jasa Kota Kupang; Evaluasi yang diadakan sebagai pedoman untuk mengetahui ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa perlu dilakukan agar anggaran yang dikelola dapat tersalurkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran dengan menyesuaikan sesuai permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada Pemda Kota Kupang sesuai dengan indikator dan kriteria penggunaan anggaran yang tersalurkan secara efektif, efisien serta pemerataan anggaran terhadap setiap bidang dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penilaian terhadap penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih pada ranah mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa di kota kupang tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Sedangkan penelitian terdahulu lebih secara terperinci membahas mengenai sistem, prosedur dan implementasi dari pada pengadaan barang dan jasa. Penulis menemukan adanya temuan penting mengenai tidak seratus persen pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa adalah sebagian besar dikarenakan kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri dari suatu tender atau program pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan. Selain itu penulis menemukan adanya prosedur yang sedikit terlambat dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa dikarenakan adanya PPKM akibat pandemi covid-19 yang membuat ruang gerak dalam pengadaan barang dan jasa sedikit terhambat, hal ini berkaitan dengan sistem dan prosedur maka adanya kaitan dengan Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. PLN (PERSERO) Area Makassar Utara yang sedikit terhambat dikarenakan aturan baru (Nurlia, 2017). Dalam pengukuran value for money yang terdapat rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran

belanja barang dan jasa. Dalam kaitan dengan penelitian sebelumnya hal ini berkaitan dengan skripsi Amelia Anisah Putri (2019) mengenai Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Tegal. Selanjutnya dalam Impelementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di kota kupang pelaksanaannya sudah dilaksanakan namun belum maksimal dikarenakan dalam pengaplikasiannya banyak kendala faktor luar yang mempengaruhi. Jika penerapan e-procurement dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa dapat dilaksanakan secara maksimal (Ahmad, 2020).

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa Kota Kupang adalah sumber daya manusia, aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta prosedur dalam pengadaan yang masih ada belum sesuai dengan standar operasional system yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Simpulan yang penulis dapatkan dalam kegiatan penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi *covid-19* di Kota Kupang adalah sebagai berikut: Evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa pandemi *covid-19* di Kota Kupang pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik; Hambatan yang terjadi dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa di Kota Kupang yakni: (1) Pandemi covid-19 berpengaruh dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa dikarenakan adanya pematuhan protokol-protokol, prosedur dan cara tertentu sesuai dengan PPKM yang mengakibatkan sedikit keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa dan keterlambatan pendataan administrasi pengadaan barang dan jasa. (2) Ketakutan aparaturnya ketika terlibat dalam permasalahan hukum dalam pengadaan yang mengakibatkan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya semakin hati-hati sehingga evaluasi realisasi belanja rendah. (3) Kualitas SDM kurang memadai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. (4) Kuantitas tenaga ahli, pegawai, staf dan atau karyawan yang mumpuni sangat sedikit dalam bidang pengadaan barang dan jasa; Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa di Kota Kupang yaitu: (1) Pemkot Kupang sedang dalam masa pengembangan aplikasi pengadaan melalui e-Pr. Hal ini dilakukan dengan tujuan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa dapat tetap terealisasi, terdata serta menambah transparansi dan kredibel dengan baik walaupun dengan situasi pandemi sekarang karena aplikasi tersebut pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik dan internet tanpa harus bertatap muka secara langsung. (2) Pemerintah Kota Kupang mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur yang benar serta ruang lingkup tupoksi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga bisa meminimalisir kemungkinan tindakan pelanggaran hukum yang ditakuti oleh pejabat pengadaan barang dan jasa. (3) Pemkot Kupang melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan, kursus, diklat dan bimtek mengenai pengadaan barang dan jasa. (4) Selain meningkatkan kualitas SDM Pemkot Kupang juga meningkatkan kuantitas SDM dengan cara mendatangkan beberapa tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Marvel Alkin.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Kupang pada tahun lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Divayana, D.G.H., & Sugiharni, G.A.D. 2016. *Evaluasi Program Sertifikasi Komputer Pada Universitas Teknologi Indonesia Menggunakan Model CSE- UCLA*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Diakses dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/8586>
- Divayana, D.G.H. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Blended Learning di SMK TI Udayana Menggunakan Model CSE-UCLA*. Jurnal Pendidikan Vokasi. Diakses dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/12687>
- Nurlia (2017). *Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara: Studi Kasus Area Makassar Utara*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. <http://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Amelia Anisah Putri (2019). *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Kabupaten Tegal*. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal. <http://core.ac.uk>
- Ahmad (2020). *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Kota Makassar: Studi Kasus Kota Makassar*. *Jurnal of Publik Policy and Management (JPPM)*. <http://journal.unismuh.ac.id>